

## EDUKASI MENDORONG PARTISIPASI AKTIF PENYANDANG DISABILITAS GUNA MENCEGAH GOLPUT DI DESA SANUR KAJA

Kadek Januarsa Adi Sudharma<sup>1</sup>, Ni Putu Winda Trisna Utami<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

<sup>1,2</sup> e-mail : [januarsa.adi@undiknas.ac.id](mailto:januarsa.adi@undiknas.ac.id); [windatrisna64@gmail.com](mailto:windatrisna64@gmail.com);

\*e-mail korespondensi: [januarsa.adi@undiknas.ac.id](mailto:januarsa.adi@undiknas.ac.id)

### Abstract

*One indicator of electoral success is a high turnout. High participation guarantees the legitimacy of government and the protection of citizens' voting rights, including vulnerable groups such as persons with disabilities. The active participation of people with disabilities in the 2024 elections in Sanur Kaja Village is very important because it will have an impact on quality leadership. Moreover, participation in people with disabilities seen from several studies has a very minimal amount of participation. In an effort to ensure the smooth implementation of elections and conduct a community service program. This service activity aims to provide education and literacy for the 2024 election to people with disabilities. This study explains the implementation of the Work Program in the framework of Community Service Activities with the title "Education Encourages Active Participation of People with Disabilities to Prevent Golput in Sanur Kaja Village. The method used is socialization of visiting the homes of people with disabilities where this service is carried out with community partners in Sanur Kaja Village, South Denpasar District, Denpasar City. The results and analysis show that this activity has succeeded in educating citizens with disabilities about their active participation in the 2024 elections and raising awareness of citizens with disabilities to exercise their voting rights.*

**Keywords :** *People with disabilities; Participation; Sanur Kaja Village*

### Abstrak

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pemilu 2024 di Desa Sanur Kaja sangat penting karena nantinya akan memiliki dampak kepemimpinan yang berkualitas. Terlebih partisipasi dalam pemilu 2024 oleh penyandang disabilitas yang dilihat dari beberapa research memiliki jumlah partisipasi yang sangat minim. Dalam upaya untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan melakukan sebuah program pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan literasi pemilu 2024 kepada masyarakat penyandang disabilitas. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan Program Kerja dalam rangka Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Edukasi Mendorong Partisipasi Aktif Penyandang Disabilitas Guna Mencegah Golput Desa Sanur Kaja. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi berkunjung ke rumah warga penyandang disabilitas yang dimana pengabdian ini di laksanakan dengan mitra penduduk di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Hasil dan analisis menunjukkan kegiatan ini berhasil mengedukasi warga penyandang disabilitas mengenai partisipasi aktif mereka dalam pemilu 2024 dan meningkatkan kesadaran warga penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya.

**Kata Kunci :** *Penyandang Disabilitas; Partisipasi; Desa Sanur Kaja*

Accepted: yyyy-mm-dd

Published: yyyy-mm-dd

## PENDAHULUAN

Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi yang wajib mencakup seluruh suara rakyat tanpa ada perbedaan maka tentunya dalam pelaksanaannya wajib tanpa ada deskriminasi (Amnesti, 2023). Sebagaimana di negara-negara lain, pemilu memiliki tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang mencakup proses

pemilu ini, serta beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi integritas dan kualitas pemilu pada tahun 2024 (Linton Naibaho et al., 2023). Salah satu indikator bahwa demokrasi itu berjalan dapat dilihat dari sebuah kegagalan atau keberhasilan dari Pemilu. Pemilu dapat dilaksanakan dalam 5 tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, dalam fenomena golongan putih yang juga dikenal sebagai golput telah menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk di Indonesia, selama beberapa pemilu terakhir. Partisipasi aktif pemilu adalah hubungan antara kesadaran masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini tidak terlepas juga dari Teori Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human right*) yakni hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan (Sudharma, 2017). Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingannya masing-masing, yang menentukan keputusan dalam pemilu. tidak hanya itu, partisipasi aktif masyarakat untuk pemilu dapat dilihat sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Kontrol yang diberikan berbeda dan beragam tergantung tingkat partisipasi masing-masing setiap individu. (Arniti, 2020).

Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi, untuk mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemilu harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi perwakilan bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi (kedaulatan) tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Pentingnya partisipasi aktif para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 ini menggambarkan sebuah esensi dari demokrasi inklusif. Meskipun demikian, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh warga penyandang disabilitas ini yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks hukum. Hasil dari penelitian (Polin, 2024). menemukan empat faktor penentu, yakni pendidikan politik, situasi lingkungan disabilitas yang demokratis, karakteristik pribadi berkaitan dengan kepedulian sosial terhadap suatu permasalahan dan kemauan untuk mau terlibat dalam suatu aktivitas atau organisasi, dan ketidakpercayaan terhadap politik.

Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental atau pun gabungan penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas diabaikan. Konsep aksesibilitas menurut penyandang disabilitas adalah suatu kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama dari segala aspek kehidupan atau keseharian sehingga mereka dapat melakukan aktivitas keseharian tanpa adanya kesulitan yang berarti (Wicaksana, 2023). Sehubungan dengan hak politik, penyandang disabilitas seringkali kurang mendapatkan tempat di lingkungan Masyarakat (Noviani et al., 2021). Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas fisik pada pelaksanaan pemilihan umum sebelumnya belum terakomodasi secara baik, karena penyandang disabilitas fisik masih merasa sulit untuk menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS), sulitnya penyandang disabilitas fisik untuk mencoblos surat suara sehingga membutuhkan seorang pendamping yang mempunyai integritas pada nilai kejujuran dalam berdemokrasi. (Wahyuni, 2019). Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya yakni, memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Namun untuk hak pilihnya para penyandang disabilitas kurang memperoleh informasi, aksesibilitas dalam pemberian suara di TPS dan suara pemilih yang rendah pada saat pemilihan.

pemahaman publik tentang disabilitas dan penyandang disabilitas berkaitan erat dengan perilaku diskriminatif yang mereka alami dalam kehidupan sehari-harinya telah disampaikan oleh beragam tulisan, riset dan laporan di berbagai tempat di dunia ini (Widinarsih, 2019). Penyandang

disabilitas dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir<sup>2</sup> disabilitas mental juga merupakan suatu gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja, atau suatu defisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral (Sudharma, 2021) partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu penting untuk terus diupayakan. Hal ini karena terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah adanya keikutsertaan seluruh elemen masyarakat, termasuk para masyarakat penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara untuk terus mengupayakan keterlibatan penyandang disabilitas, salah satunya dengan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih aksesibel agar dapat memudahkan mereka untuk berpartisipasi. Pada kenyataannya upaya-upaya tersebut belum dapat optimal, keikutsertaan para penyandang disabilitas masih sangat rendah karena masih banyak yang Golput. Pemilih yang tidak menggunakan hak suara mereka pada hari pemilu disebut Golput. Golput merupakan orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan orang yang tidak percaya dengan hasil Pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Ia tidak bisa datang ke TPS atau datang tetapi membuat suara tidak sah (Masriawan & Adi, 2019). Dalam hal masyarakat harus memahami konsekuensi negatif dari tidak hadir dan mengambil tindakan untuk menghindarinya (Iswardhana et al., 2023). Golput dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: pertama, seseorang yang sudah mempunyai hak pilih sekaligus terdaftar, tetapi tidak menggunakannya. Kedua, seseorang yang mempunyai hak pilih tetapi tidak ikut terdaftar sehingga menjadi kehilangan haknya untuk memilih. Kegiatan sosialisasi ini berencana dapat membangun pengoptimalan dalam pelaksanaan pendidikan pemilu pada penyandang disabilitas dengan beberapa aspek seperti informasi pelaksanaan pemilu dan pendidikan pemilih. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan komunitas yang mengayomi serta meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas ini dalam menerima informasi terbaru berbasis pendidikan pemilih disabilitas. Berbicara dengan Pemilu maka tidak akan bisa lepas dari faktor utama yakni rakyat. Rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya yang kemudian diwakilkan pada calon yang akan mereka pilih.

Dari gambaran fenomena ini berasumsi bahwa permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas disebabkan karena tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang tidak maksimal. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif. Inklusi mengacu pada prinsip membangun masyarakat yang menerima dan menghargai keberagaman, termasuk kondisi disabilitas. Keadilan menekankan perlunya memberikan hak-hak yang setara dan peluang yang adil kepada semua warga negara. Dalam pemilihan umum, teori ini mendorong pembentukan kebijakan dan praktik yang mendukung partisipasi aktif dan merata bagi penyandang disabilitas. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan adanya kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Selain itu partisipasi aktif masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak manapun (Lestari, 2019).

## METODE

Pemilu adalah sebagai salah satu bentuk praktik demokrasi, Dimana kesempatan untuk memilih calon- calon wakil rakyat ataupun kepala negara yang selama duduk di parlemen mampu bertindak atas nama rakyat dan menentukan arah dari suatu negara. (Ariyanti et al., 2021). Peran masyarakat sangat akan berdampak besar bagi masa depan negara ini begitu juga dengan para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Maka dari itu program kerja yang dilaksanakan di Desa Sanur Kaja yang bertemakan "Edukasi Mendorong Partisipasi Aktif Penyandang Disabilitas Guna Mencegah Golput di Desa Sanur Kaja". Penulis memutuskan untuk menggunakan metode sosialisasi, membagikan Brosur dan menyerahkan sedikit bantuan kepada warga penyandang disabilitas di Desa Sanur Kaja dengan berkunjung ke rumah warga di tiga banjar yaitu banjar Belong, Pekandelan dan Anggar Kasih didampingi oleh kelian dusun, pengawas kelurahan desa dan PPS desa Sanur kaja, yang berada di Desa Sanur Kaja. Tujuan kegiatan sosialisasi ini, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu 2024 kepada penyandang disabilitas dan mendorong warga disabilitas ikut berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin 5 tahun kedepan dengan menggunakan hak suara mereka. Saya berharap masyarakat penyandang disabilitas merasa terlibat dan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemilu. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memberikan suara mereka dengan bijak dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Deskripsi Kegiatan**

Lokasi dan Waktu Kegiatan: Program Kerja Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2024 pukul 15.00 – 17.00 WITA. Lokasi program kegiatan ini diselenggarakan di Desa Sanur Kaja yaitu berkunjung ke rumah warga di Banjar Belong, Banjar Anggarkasih, dan Banjar Pekandelan.

Kelompok Sasaran : Warga Penyandang Disabilitas di Desa Sanur Kaja

Dilansir dari jurnal (Syahputra & Putra, 2020) mengatakan bahwa mahasiswa sebagai manusia berpendidikan yang dibentuk dalam pendidikan perguruan tinggi tentunya harus diuji kematangannya dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi. Salah satunya dengan melakukan pengabdian terhadap masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan dengan sosialisasi pada warga penyandang disabilitas berkunjung ke rumah warga di tiga banjar yaitu banjar Belong, Pekandelan dan Anggar Kasih yang berada di Desa Sanur Kaja dimana merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran warga penyandang disabilitas tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemilu 2024. Kegiatan program Kerja sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Program kerja ini dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah warga dan mensosialisasikan mengenai pemilu guna mencegah golput. Sosialisasi yang dilakukan untuk penyandang disabilitas ini bermaksud untuk memberikan sebuah pengetahuan dan informasi yang dimana dalam sosialisasi tersebut memiliki sebuah konten khusus yang dapat dijangkau dan dipahami oleh para penyandang disabilitas yang dapat memunculkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pemilu 2024 bagi warga penyandang disabilitas, seperti penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, dan pendampingan khusus yang dapat diperkenalkan untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program kerja pelaksanaan sosialisasi ini yaitu dengan adanya bukti respon positif masyarakat disabilitas dan baik kepada saya terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah berlangsung saat itu.

Berikut merupakan gambar kegiatan Mahasiswa KKN Tematik Universitas Pendidikan Nasional yang melakukan kegiatan sosialisasi dengan berkunjung ke rumah warga penyandang disabilitas di Banjar Pekandelan, Banjar Belong, dan Banjar Anggar Kasih:

<p>Tabel Gambar 1. sosialisasi ke rumah warga banjar anggar kasih yang di dampingi pps desa sanur kaja, perangkat kelurahan desa dan kelihan dusun</p>	<p>Tabel Gambar 2. Menyerahkan sedikit bantuan kepada warga penyandang disabilitas di banjar pekandelan</p>
	

Dengan adanya program kerja ini menunjukkan mulai adanya ketertarikan masyarakat mengenai Pemilu. Selain itu juga dapat membagikan informasi lebih yang sebelumnya tidak termasuk dalam materi atau brosur kepada masyarakat sehingga fakta yang mereka dapat bisa di bagikan dan fakta tersebut menyebar luas hingga lebih jelas. Dengan begitu dari mulai adanya ketertarikan ini akan membuat masyarakat penyandang disabilitas untuk bisa memberikan hak suaranya dengan sah dan menekan tingginya angka golput yang khususnya terjadi di Desa Sanur Kaja.

Mahasiswa KKN Desa Sanur Kaja Universitas Pendidikan Nasional Denpasar juga membagikan brosur saat jalanya kegiatan sosialisasi berlangsung dengan mendatangi Masyarakat yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi. Berikut merupakan gambar kegiatan pembagian brosur saat jalanya kegiatan sosialisasi berlangsung:

Tabel Gambar 3. Pembagian brosur di rumah warga Banjar Pekandelan



Tabel Gambar 4. Pembagian brosur di rumah warga Banjar Belong



Besarnya antusias dan partisipasi Masyarakat penyandang disabilitas yang merupakan audiens yang bersangkutan dalam pelaksanaan sosialisasi yang dimana indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Hal ini dapat dilihat dari antusias adanya komunikasi timbal balik atas jawaban yang diutarakan oleh Masyarakat di Desa Sanur Kaja kepada Mahasiswa KKN Desa Sanur kaja. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program kerja pelaksanaan sosialisasi ini. Dengan adanya bukti respon positif dan baik kepada saya terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah berlangsung. Adapun perubahan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah di laksanakan program kerja sosialisasi ini yaitu:

Tabel 1. perubahan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan sosialisasi

Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi tentang kepemiluan kepada masyarakat penyandang disabilitas di Desa Sanur Kaja yang cenderung golput karena kesulitan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan kurangnya pemahaman tentang partisipasi dalam kepemiluan.	Sesudah melakukan kegiatan Sosialisasi tentang kepemiluan masyarakat penyandang disabilitas menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk menggunakan hak pilih nya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan program kerja sosialisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dengan tema Edukasi mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas guna mencegah golput di desa sanur kaja telah berhasil dilakukan dan mendapatkan komentar positif dari perangkat desa dan Masyarakat sanur kaja. Masyarakat penyandang disabilitas mengaku banyak mendapatkan pengetahuan baru mengenai partisipasi aktif dalam pemilu, dan kepemiluan yang akan segera diselenggarakan oleh KPU. Masyarakat penyandang disabilitas juga jadi lebih memahami tentang peran hak suaranya yang sangat berarti untuk 5 tahun kedepan, selain itu saya dan teman-teman mahasiswa KKN Desa sanur kaja juga mendapatkan ilmu public speaking dikarenakan langsung kelapangan dan bersosialisasi kepada Masyarakat penyandang disabilitas yang ada di desa sanur kaja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amnesti. (2023). Amnesti: Jurnal Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Diskriminasi Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum. *Amnesti*, 5(2), 225–236.
- Ariyanti, D., Nawangsih, V., RizaAisyah, R., & ... (2021). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Ikra-Ith ...*, 4(3), 219–229. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/view/1542%0Ahttps://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-ABDIMAS/article/download/1542/1262>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Iswardhana, M. R., Zakinah, M., Maharani, G. A., Tayan, W. G., & Nuraini, A. (2023). Kampanye Gunakan Hak Suara dan Jangan Golput pada Pemilu 2024 Untuk Generasi Muda. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 117–122. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.2014>
- Sudharma, K.J.A. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 03(02).
- Lestari, D. S. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 Di Kabupaten Pinrang. *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3(1), 18–23.
- Linton Naibaho, Johan Pardamean Simanjuntak, Yana Sebha Pasaribu, Roselli Anjelina Lumbansiantar, Nelly Moria Hutapea, Ivana Theo Philia, Kania Nova Ramadhani, & Tri Santa Mahulae. (2023). Peran Mahasiswa PPKN FIS Universitas Negeri Medan Dalam Menghadapi Tantangan Politik 2024, Studi Kasus: Praktek Money Politik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.728>
- Masriawan, & Adi, A. S. (2019). Strategi Sosialisasi KPU Sumenep dalam Menekan Angka Golput pada Pemilu 2019. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07(02), 1101–1115.
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *Perspektif*, 10(1), 88–99. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>
- Polin, F. M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam*

*Pemilihan Umum Presiden. 7, 262–272.*

- Sudharma, K. J. A. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali. *Jurnal Panorama Hukum, 2*(2), 203. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1977>
- Syahputra, A., & Putra, H. R. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (Kpm). *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 1*. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1i.349>
- Wahyuni, tri agustini. (2019). *tri agustina wahyuni. 1–154.*
- Wicaksana, adhitya mujibakti. (2023). Disabilitas dalam angka. *Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 1–7*. <https://jakarta.bps.go.id/news/2023/01/05/828/disabilitas-dalam-angka.html>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20*(2), 127–142.